

## **BAB IV**

### **FAKTOR KEDEKATAN POLITIK LUAR NEGERI ARAB SAUDI DENGAN AMERIKA SERIKAT**

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat sebelum konflik, pasca konflik dan dukungan yang diberikan Amerika Serikat kepada Arab Saudi. Hubungan antarnegara telah menjadi kebutuhan utama bagi setiap negara jika ingin mempertahankan eksistensi dan memajukan negaranya. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa konflik di suatu negara dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi di berbagai negara.

Menurut Carl J Friedrich, politik merupakan suatu upaya atau cara untuk memperoleh atau mempertahankan kekuatan. Politik juga dapat diartikan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki yang akan digunakan untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Kehidupan berpolitik tak pernah lepas dari kehidupan sosial suatu negara. Masyarakat di Timur Tengah dengan didominasi oleh bangsa Arab mengakibatkan kultur pemerintahan yang ada di negara tersebut sebagian besar adalah diktator. Salah satu faktor historis karena di wilayah tersebut yang dahulu bersistem kerajaan. Hubungan antarnegara diwujudkan dalam hubungan keilmuan, sosial, politik, diplomatik, ekonomi, budaya dan pertahanan dan keamanan.

Adanya kepentingan nasional dikarenakan adanya kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi negaraitu sendiri. Baik dalam segi militer, politik, ekonomi maupun sosial dan budaya. Kepentingan juga dikaitkan dengan '*power*' sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi negaralain dan mendapat pengakuan dunia. Dengan demikian secara konseptual kepentingan nasional digunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara.

Kebijakan luar negeri yang diungkapkan oleh William D. Coplin sebagai analisa untuk mengkaji hubungan Arab Saudi dengan Amerika Serikat. Ia menjelaskan bahwa

kebijakan luar negeri dipengaruhi beberapa faktor determinan antara lain:<sup>39</sup> *Pertama*, Situasi politik domestik, termasuk faktor budaya sebagai dasar tingkah laku politik. *Kedua*, Situasi ekonomi dan militer domestik, termasuk faktor geografis yang selalu mendasari pertimbangan pertahanan dan keamanan. *Ketiga*, Konteks internasional, yaitu pengaruh negara-negara lain atau konsentrasi politik internasional.

## **A. Kondisi Politik Dalam Negeri**

### **1. Konflik Dalam Negeri Arab Saudi**

#### **a. Persaingan antar Elit Arab Saudi**

Arab Saudi merupakan negara yang berbentuk monarki absolut. Dimana penguasanya adalah seorang raja yang dipilih secara turun-temurun. Semua penguasa Saudi berasal dari klan Sudairi. Sejak Raja Saud, Raja Faisal, Raja Khalid, Raja Abdullah, hingga raja ketujuh, Salman bin Abdul Aziz, beribu Hissa as-Sudairi, satu dari sekian banyak istri mendiang Raja Abdul Aziz.

Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdulaziz pada 2006 mengeluarkan dekrit: jika putra terakhir dari pendiri Arab Saudi mendiang Raja Abdul Aziz bin Saud meninggal, penguasa baru negara ka'bah itu akan dipilih di antara para cucunya oleh sebuah dewan berisi pangeran-pangeran senior.

Ketika dekrit itu keluar, selain Raja Abdullah, anak lelaki dari mendiang Raja Abdul Aziz dari klan Hissa as-Sudairi masih hidup adalah Putera Mahkota Pangeran Nayef bin Abdulaziz, Wakil Putera Mahkota Sultan bin Abdulaziz, Gubernur Mekah Salman bin Abdulaziz dan termuda Pangeran Murqin bin Abdulaziz.

Salman beruntung, lima tahun kemudian Pangeran Nayef meninggal. Raja Abdullah menunjuk dia sebagai Wakil Putera Mahkota dan Pangeran Sultan naik menjadi Putera Mahkota. Namun selang setahun Pangeran Sultan wafat. Pangeran Salman naik pangkat menjadi Putera Mahkota. Raja

---

<sup>39</sup> Sidik Jatmika, *Op.cit.*, hlm. 150

Abdullah lantas mengangkat Pangeran Murqin sebagai Wakil Putera Mahkota.

Hingga akhirnya Raja Abdullah menemui ajal dan Pangeran Salman dinobatkan sebagai raja baru di negeri Dua Kota Suci itu. Seperti biasa, Pangeran Murqin naik menjadi Putera Mahkota dan Raja Salman menunjuk Pangeran Muhammad bin Nayef sebagai Wakil Putera Mahkota yang merupakan anak tertua dari kakak Raja Salman, Nayef bin Abdulaziz.

Di sinilah Raja Salman mulai menyiapkan keturunannya sebagai calon raja Saudi. Tiga bulan setelah naik tahta, dia mencopot Pangeran Murqin pada bulan April 2015 dan memberi jalan bagi Pangeran Mohammed bin Salman, putra sulung dari istri ketiganya, menjadi wakil putera mahkota. Pangeran Murqin dicopot lantaran dia dianggap terlalu reformis seperti mendiang Raja Abdullah. Selain itu, darah bangsawan Pangeran Murqin ternoda lantaran ibunya bukan orang ningrat.

Berselang dua tahun kemudian, Pada tanggal 21 Juni 2017 terjadi perombakan kabinet, Raja Salman mencopot gelar Putera Mahkota milik keponakannya, Pangeran Muhammad bin Nayef yang otomatis membuat Pangeran Mohammed bin Salman naik menjadi Putera Mahkota. Tidak diketahui pasti alasan penggulingan Pangeran Muhammad bin Nayef sebagai Putera Mahkota.

Sejak kebijakan Raja Salman melepas gelar Putera Mahkota milik Pangeran Murqin dan memasukkan Pangeran Mohammed sebagai Wakil Putera Mahkota memicu kemarahan adik-adiknya dan perseteruan internal semakin terasa. Hal yang dilakukan Raja Salman dianggap melanggar tradisi. Karena itulah pada tahun 2015 muncul suara terbuka menyerukan penggulingan Raja Salman lantaran dianggap terlalu tua buat berkuasa. Kala itu Raja Salman berusia 80 tahun. Seruan kudeta dibuat oleh Pangeran Ahmad bin Abdulaziz.

Baru-baru ini Raja Salman mendapat teror tembakan disekitar istana raja. Hal ini dianggap sebagai bentuk kudeta

terhadap Raja Salman atas tindakan yang dilakukan terhadap pangeran-pangeran dalam upaya mengangkat putera sulung dari istri ketiganya menjadi Putera Mahkota Arab Saudi. Konflik internal dan persaingan antar pangeran sejatinya bukan hal baru di Saudi, namun kudeta tidak umum terjadi kepada seorang Raja Saudi.

### **b. Kelompok Syiah**

Kelompok minoritas adalah di antara masalah sensitif di dunia. Sangat disayangkan, sejumlah negara tidak menjaga hak-hak minoritas agama, dan malah mendorong ke arah diskiriminasi. Kondisi Syiah di Arab Saudi dapat disebut sebagai contoh jelas pengabaian hak-hak kelompok minoritas. Di Arab Saudi, kelompok Syiah tidak mendapat hak-hak mendasar. Akan tetapi pemerintah negara ini tidak melakukan tindakan apapun untuk kelompok tertindas di negara ini. Padahal mereka adalah warga negara ini yang semestinya mendapatkan hak-hak seperti warga lainnya. Meski jumlah populasi Syiah di Arab Saudi tidak terdata secara detail, tapi sekitar 10 hingga 15 persen penduduk negara ini bermadzhab Syiah. Pada umumnya, komunitas Syiah di Arab Saudi berada di timur negara ini. Sebagian lainnya juga berada di kota suci Madinah. Dari sisi sejarah, Syiah di Arab Saudi mempunyai sejarah panjang di negara ini dan dunia Arab. Meski sepanjang sejarah, komunitas Syiah hidup di bawah pemerintah Sunni, namun mereka biasanya mempunyai posisi terhormat di tengah masyarakat. Akan tetapi kondisi ini tidak bertahan lama setelah berkuasanya keluarga Arab Saudi di awal abad ke-20.

Komunitas Syiah di negara ini ditindas di masa keluarga Saudi. Keluarga Saudi berkeyakinan Wahabi. Menurut keyakinan ini, sejumlah ajaran Syiah dianggap syirik yang harus ditentang. Yang lebih ekstrim lagi, sejumlah ulama Wahabi mengeluarkan fatwa menghalalkan darah Syiah.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> [http://indonesian.irib.ir/ranah/sosialita/item/34053-Syiah\\_di\\_Arab\\_Saudi\\_dan\\_Ketertindasan](http://indonesian.irib.ir/ranah/sosialita/item/34053-Syiah_di_Arab_Saudi_dan_Ketertindasan) diakses 22/04/18 pukul 17:00

### **i. Satu Abad Penindasan Syiah**

Masa penindasan terhadap kelompok Syiah di Arab Saudi sudah memasuki satu abad. Selama itu, kelompok Syiah di negara ini benar-benar dimarginalkan, bahkan hak-hak mereka diabaikan. Kondisi itu terus berlanjut hingga kini, bahkan kelompok Syiah sekarang ini tidak boleh menggelar shalat jamaah di rumah mereka. Seorang tokoh Syiah di Arab Saudi, Hasan Ali Al-Maliki ditangkap karena tuduhan menggelar shalat jamaah di rumahnya. Ternyata Hasan Ali Al-Maliki bukan orang pertama yang ditangkap karena menggelar shalat jamaah di rumahnya. Sebelumnya, ada beberapa warga Syiah di Arab Saudi yang dijebloskan ke penjara dengan tuduhan menggelar shalat jamaah di rumah mereka.

Sikap pemerintah Arab Saudi ini tentunya mendapat reaksi keras dari berbagai pihak. Direktur Arabic Network for Human Rights, Gamal Eid menilai tindakan Arab Saudi yang melarang warga Syiah menggelar shalat jamaah di rumah mereka, sebagai sikap rasis dan arogan. Hal yang harus menjadi catatan bahwa larangan menggelar shalat jamaah di rumah bukan berarti memperbolehkan warga Syiah melakukan shalat di masjid. Ibrahim Al-Muqaithib yang juga anggota Organisasi Hak Asasi Manusia di Arab Saudi mengatakan, “Warga Syiah di Arab Saudi tidak boleh melakukan shalat di masjid dan juga tidak boleh berpartisipasi dalam peringatan-peringatan agama. Mereka juga tidak diizinkan untuk mengerjakan shalat di masjid-masjid.”

Hujjatul Islam Mohammad Bagir Al-Naser, imam jamaah di wilayah Khobar, mengeluarkan statemen keras mengenai pelarangan pelaksanaan shalat jamaah di masjid. Dalam statemen itu, ia menyatakan, “Setelah pemerintah melarang shalat jamaah di masjid-masjid, warga Syiah ingin bergabung dengan kelompok Sunni dan bersedia menjadi makmum imam masjid setempat. Akan tetapi upaya ini tetap dilarang oleh pemerintah Arab Saudi.” Bagian lain statemen itu juga menambahkan, “Untuk itu, kita baru bisa melakukan

shalat jamaah di masjid-masjid dengan syarat meninggalkan hukum fikih Syiah”.<sup>41</sup>

Ketika komunitas Syiah tidak diizinkan menggelar shalat jamaah dan acara keagamaan di masjid dan rumah-rumah mereka, maka peringatan Asyura atau Hari Kesyahidan Cucu Rasulullah SAW, Imam Husein as, juga tidak dapat dilaksanakan di negara ini. Padahal acara Asyura mendapat perhatian tersendiri dari kalangan Syiah di dunia. Acara semulia peringatan mengenang kesyahidan cucu kesayangan Rasulullah SAW pun dilarang di negara ini. Lantaran memperingati kesyahidan Imam Husein as, sekitar 30 warga Syiah ditangkap.

Selain itu, para pejabat Arab Saudi juga berupaya menghalangi warga Syiah memiliki tempat untuk menyelenggarakan acara-acara keagamaan. Karena kebijakan ini, sejumlah masjid dan huseiniyah ditutup di negara ini. Belum lama ini, Menteri Dalam Negeri Arab Saudi, Nayef bin Abdul Aziz mengeluarkan perintah menutup sembilan masjid Syiah. Penutupan ini mendorong kelompok Syiah di negara ini mengumpulkan tanda tangan yang kemudian dikirimkan ke Raja Abdullah bin Abdul Aziz.

Dengan pengumpulan tanda tangan itu, komunitas Syiah di Arab Saudi meminta Raja Abdullah bin Abdul Aziz supaya kembali membuka masjid-masjid Syiah dan menyetop larangan bagi warga Syiah untuk beraktivitas. Selain itu, mereka juga meminta pembebasan warga Syiah yang ditahan karena menggelar shalat jamaah di rumah mereka. Apalagi para tahanan Syiah yang ditahan mempunyai umur di atas 50 tahun. Sebagian besar pengikut madzhab Ahlul Bait di Arab Saudi dipenjara karena masalah agama dan politik.

Protes dan reaksi atas sikap diskriminasi terus berlanjut, dan Komite Kebebasan Beragama di Amerika Serikat akhirnya melayangkan surat protes terhadap pemerintah Arab Saudi. Komite itu juga meminta pembebasan

---

<sup>41</sup> *Ibid*

terhadap tahanan terlama di Arab Saudi yang bernama Hadi Al-Mathif.

## **ii. Larangan Bekerja di Instansi**

Tak diragukan lagi, selama diskriminasi terhadap warga Syiah terus berlanjut, pemerintah Arab Saudi tidak akan mengizinkan warga Syiah terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan politik di negara ini. Warga Syiah di negara ini tidak boleh bekerja di instansi resmi pemerintah seperti militer dan kepolisian. Dengan demikian, warga Syiah tidak akan mendapatkan posisi penting di negara.

Selain itu, kondisi warga Syiah terus menghadapi penghinaan, bahkan anak-anak Syiah mendapat cemooh di lingkungan-lingkungan pendidikan dan akademi. Yang lebih ekstrim lagi, buku-buku pendidikan di negara ini sarat dengan doktrinasi anti-Syiah. Para guru Syiah juga tidak berhak menonjolkan keyakinan mereka. Jika tetap membangkang, mereka akan dijebloskan ke penjara. Para ulama Syiah juga dilarang menyampaikan ajaran-ajaran Ahlul Bait kepada para pengikut madzhab ini. Kondisi Syiah benar-benar terisolir di Arab Saudi.

Berbagai penghinaan anti-Syiah juga mewarnai kampus-kampus di negara ini. Mahasiswa yang ketahuan bermadzhab Syiah akan mendapatkan kendala serius untuk mendapat prestasi. Sementara itu, mahasiswa yang menulis skripsi anti-Syiah akan mendapat poin istimewa. Bahkan, pemerintah juga akan mencetak hasil skripsi tersebut. Sebaliknya, warga Syiah sama sekali tidak berhak mencetak karya-karya mereka. Pada saat yang sama, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan dana besar hingga jutaan dolar untuk mencetak buku-buku anti-Syiah di negara ini. Lebih dari itu, situs dan media-media anti-Syiah di dalam dan luar Arab Saudi seperti Televisi Al-Arabiah, juga mendapat dukungan penuh dari Arab Saudi.

Komunitas Syiah di Arab Saudi berada di sumber-sumber minyak. 40% pekerja perusahaan minyak Amerika, Aramco Services Company (ASC) yang juga perusahaan

utama eksplorasi minyak di Arab Saudi, adalah warga Syiah. Dengan demikian, kondisi ekonomi komunitas Syiah tidak ideal. Pemerintah Arab Saudi menutup pintu niaga bagi para pengusaha Syiah. Dengan demikian, Arab Saudi menerapkan diskriminasi terhadap komunitas Syiah di bidang politik, sosial dan ekonomi.<sup>42</sup>

### **iii. Faktor Anti-Syiah di Arab Saudi**

Pada intinya, ada dua faktor yang menyebabkan pemerintah Arab Saudi bersikap sentimen terhadap kelompok Syiah. Pertama, keyakinan radikal Wahabi yang bertolak belakang dengan Syiah.

Adapun faktor kedua adalah unsur politik. Fenomena Revolusi Islam Iran dianggap sebagai ancaman bagi kerajaan keluarga Saudi yang kini berkuasa di Arab Saudi. Munculnya gerakan-gerakan perjuangan Syiah di Irak, Lebanon dan Yaman kian mengkhawatirkan para penguasa Arab Saudi. Kondisi inilah yang membuat pemerintah Arab Saudi kian menekan warga Syiah di dalam negeri.

Pandangan sempit dan radikal pemerintah Arab Saudi menyebabkan para pejabat negara ini memasukkan diskriminasi dan pelecehan terhadap Syiah dalam program kerja pemerintah. Pada mulanya, warga Syiah berharap Raja Abdullah bin Abdul Aziz yang menggantikan kakaknya, Fahd bin Abdul Aziz, dapat mengubah kondisi yang ada. Akan tetapi hingga kini, tidak ada perubahan akan kondisi yang ada. Syiah tetap dimarginalkan di negara ini. Padahal keterlibatan Syiah di berbagai kancah malah justru menguntungkan pemerintah Arab Saudi. (IRIB).<sup>43</sup>

### **c. Rakyat yang tidak puas dengan pemerintahan Arab Saudi**

Bak gayung bersambut, setelah kegagalan ISIS untuk menjatuhkan Basar al-As'ad di Suriah dan Irak, kini para

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> *Ibid*



sekutu Amerika seperti Arab Saudi, Qatar dan kawan-kawan melanjutkan agendanya di Yaman. Pada konflik ini tidak ada kaitannya dengan konflik sektarian yang didengungkan saat ini tentang Sunni-Syi'ah. Ini murni karena hegemoni kekuasaan Monarki para Raja di Timur-Tengah sendiri yang tidak ingin posisi mereka disinggasana yang telah nyaman dan bergelimpangan harta jatuh diganti oleh sistem Republik made in Amerika. Sistem Republik yang selama ini dianut oleh Amerika sendiri telah digaung-gaungkan bahwa inilah sistem tata negara yang paling baik di dunia.

Dua syarat terpenuhi yaitu kemampuan keuangan yang memadai serta dukungan dari rakyat dalam negeri yang besar.<sup>44</sup>

### **i. Keuangan**

Dalam perang ini Saudi telah mengirimkan 100 jet tempur mereka ditambah dengan 150ribu pasukan perang dan beberapa kekuatan militer mereka yang lain. Sebagai perbandingan, untuk menerbangkan satu Sukhoi-27 selama satu jam RI membutuhkan biaya sebesar 100juta rupiah, bisa dikalkulasikan berapa jumlah biaya yang dibutuhkan untuk menerbangkan 100 jet tempur selama beberapa hari atau bulan kedepannya, belum termasuk biaya 150ribu pasukan dan kendaraan tempur lainnya, berapa total ongkos yang harus dikeluarkan. Darimana biaya tersebut didapat? selama ini komoditi utama dari Saudi adalah minyak bumi. Untuk mendapatkan dana perang yang dibutuhkan mereka harus menjual minyaknya, tentu dengan harga yang telah dinaikkan beberapa kali lipat sehingga mereka memperoleh sumber dana tersebut.

Tetapi lamanya waktu untuk perang tidak akan pernah diprediksi secara pasti, hanya hitungan kertas saja. Berkaca pada invasi Amerika ke Afganistan guna menangkap pimpinan

---

<sup>44</sup> [https://www.kompasiana.com/april\\_kukuh/serangan-saudi-membahayakan-negerinya-sendiri\\_55206e90a33311314746ce28](https://www.kompasiana.com/april_kukuh/serangan-saudi-membahayakan-negerinya-sendiri_55206e90a33311314746ce28)  
diakses 22/04/18 pukul 20:10

Al-Qaeda Osama bin Laden, pihak Amerika memerlukan waktu hampir 6 tahun dengan dukungan perlengkapan militer yang canggih serta dana yang besar waktu itu. Kemudian agresi ke Irak guna menjatuhkan rezim Saddam Husain juga memerlukan waktu yang tahunan. Serangan Israel ke sarang Hizbullah dalam beberapa periode perang juga tidak pernah bisa menghancurkan Hasan Nasrullah. Yang terbaru adalah serangan ke rezim Bashar As'ad selama 4 tahun terakhir juga tidak berhasil menggulingkannya. Sehingga kemungkinan perang yang terjadi di Yaman ini akan berlangsung lama, itupun belum tentu berhasil.

Yang terjadi pada Amerika dalam beberapa tahun terakhir ini kelak akan terjadi di negeri Saudi tersebut. Perang yang tidak kunjung usai dan biaya yang terus membengkakkan kas negara menyebabkan berkurangnya fokus dibidang lainnya terutama yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyatnya. Sehingga dukungan kepercayaan rakyatnya pun juga menurun.

## **ii. Dukungan Rakyat**

Rezim kerajaan yang selama ini nyaman, kelak kemudian hari akan tumbang dengan sendirinya ditangan rakyat mereka, akibat tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Rakyat mereka tidak terbiasa hidup susah seperti halnya rakyat Palestina ataupun rakyat Iran yang hidup dengan embargo negara barat. Karena rakyat mereka terbiasa hidup dengan mengandalkan komoditi minyak mereka tanpa mau membangun kemampuan dalam negeri seperti rakyat Iran. Gerakan kekuatan rakyat tersebut kemungkinan besar akan dimotori oleh orang-orang dalam kerajaan sendiri yang tidak puas dengan kebijakan Rajanya serta masing-masing Pangeran yang merasa lebih berhak untuk menduduki singgasana tersebut.

Seperti halnya sistem kerajaan yang ada di Nusantara yang hancur bukan karena serangan dari luar Nusantara tetapi dari konflik dalam negeri sendiri. Kerajaan Singosari yang ditumbangkan akibat pemberontakan dari Jayakatwang,

Kerajaan Majapahit yang berkuasa selama 350 tahun yang begitu besar juga runtuh akibat dari pergolakan dalam kerajaan itu sendiri. Kerajaan Mataram juga jatuh karena pemberontakan dari saudaranya sendiri. Dan tinggal tunggu waktunya saja Kerajaan Saudi akan jatuh karena pergolakan dan pemberontakan dari dalam negeri mereka sendiri juga dari golongan kerajaan itu sendiri.

Gerakan ini murni dari nurani rakyat yang tertindas yang ingin menuntut keadilan, bukan atas latar belakang konflik mazhab antara Sunni dan Syi'ah yang selama ini didengung-dengungkan. Toh pada jaman kerajaan Nusantara dahulu juga belum ada konflik antar mazhab tersebut. Karena yang ada hanyalah kepentingan pribadi Raja dan beberapa kelompok disekitarnya untuk suatu kerajaan yang diperebutkan.

Pasca kegagalan menjatuhkan rezim Basar al-As'ad di Suriah melalui ISIS yang sengaja diciptakan oleh Israel, Amerika dan Saudi. Kini perhatian Timur Tengah akan tertuju ke negeri Hadramaut Yaman. Untuk menjatuhkan pengaruh kelompok Houthi setelah berhasil menggulingkan Presiden sebelumnya Abeddrabbo Mansour Hadi. Melalui para Menteri Luar Negeri, negara-negara Arab telah sepakat untuk membentuk Pasukan Militer Gabungan Arab Reaksi Cepat atas permintaan Presiden Yaman sebelumnya. Pembentukan pasukan ini rencana awalnya untuk mengatasi krisis seperti yang terjadi di Yaman.<sup>45</sup>

Bagi Arab Saudi sendiri perang ini merupakan sebuah pertarungan yang besar, karena dilakukan tanpa adanya campur tangan negara barat sekutu mereka seperti Amerika Serikat, Inggris dan Israel. Pasukan Gabungan ini tidak sekedar menghadapi Houthi semata, tetapi juga para milisi suku di Yaman termasuk golongan Ahlussunnah sendiri yang merasa tidak puas dengan pemerintahan Presiden Mansour Hadi.

Yaman sendiri meskipun memiliki cadangan minyak yang cukup besar dan posisinya yang strategis tetapi tidak

---

<sup>45</sup> *Ibid*

mampu menaikkan derajat negeri tersebut. Yaman tetaplah negara miskin dengan krisis pangan yang dihadapi serta adanya kesenjangan sosial yang tinggi.

Sejak 2004 suku Houthi menuntut ekonomi khusus diwilayah Saada sebagai protes atas diskriminasi dan penindasan dari penguasa. Pada tahun 2011, seiring dengan bertumbuhannya para diktator negara Arab mulai dari Husni Mubarak di Mesir hingga Khadafi di Libya, rakyat Yaman kemudian bangkit berdemo menuntut pengunduran diri Presiden Saleh yang telah berkuasa selama 33 tahun. Kemudian pada periode November 2011 Saleh melarikan diri ke Arab Saudi dan kedudukannya digantikan oleh Mansour Hadi.

Keberhasilan Penjatuhan rezim Saleh malah terjadi penyingkiran terhadap kelompok-kelompok yang ikut berjuang tadi termasuk suku Houthip -Ansarullah- (habis manis sepah dibuang). Ini memunculkan ketidakpuasan rakyat yang semula berharap terjadinya reformasi. Gerakan Ansarullah kemudian berhasil memobilisasi sebagian besar rakyat umum sejak 2014 menuntut dilakukannya reformasi segala bidang. Pada awalnya Presiden bersedia menandatangani perjanjian dengan Ansarullah, perjanjian ini menandai semakin besarnya pengaruh Ansarullah di pemerintahan pusat, tetapi kemudian sang Presiden Mansour Hadi lebih memilih lari ke Arab Saudi dan meminta bantuan militer. Sejak 26 Maret 2015, Arab Saudi dibantu beberapa negara Teluk dan Israel, serta didukung oleh AS menyerang Yaman.

Perang Agresi dapat dilakukan jika minimal dua syarat telah terpenuhi yaitu kuatnya keuangan suatu negara serta dukungan dari rakyat dalam negeri sendiri. Keterkaitan kedua hal tersebut menjadi suatu konsekuensi terjadinya perang, biaya perang yang sangat mahal tersebut diambil dari uang rakyat yang dibayar melalui pajak mereka, maka melakukan agresi perang haruslah mendapat persetujuan rakyat.

Amerika sendiri tidak mau turut campur langsung dengan mengirim pasukan mereka ke Timur-Tengah.

Peperangan terhadap Al-Qaidah di Afganistan serta Saddam Husain di Irak memberikan banyak pelajaran kepada negeri Paman Sam ini. Pasca agresi Amerika terhadap kedua negara arab tersebut (Irak dan Afganistan), Amerika mendapatkan akibat dari ulah mereka didalam negeri. Perang yang berkepanjangan menyedot kas negara mereka, sehingga kondisi tersebut mengakibatkan ekonomi rakyatnya terabaikan.

Akibat yang terjadi beberapa tahun terakhir Amerika mendapat hantaman berupa krisis ekonomi yang sempat membuat mereka sempoyongan. Keadaan ini memaksa beberapa perusahaan di Amerika gulung tikar sehingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja massal secara serentak. Menyebabkan jumlah pengangguran bertambah banyak, yang berakibat pada semakin meningkatnya angka kriminalitas di negeri tersebut.

Rakyat juga butuh makan dan tidak ingin tinggal diam mengatasi keadaan, rakyat di Amerika sendiri tidak mau tahu alasan apapun menuntut agar dilakukan perbaikan dibidang ekonomi guna tersedianya kembali lapangan kerja untuk menyerap para pekerja yang telah di PHK sebelumnya.

Dalam konflik Timur-Tengah Kali ini, Amerika belajar banyak dari dua agresi sebelumnya. Biaya perang yang sangat mahal dan dukungan dari rakyat yang terus menurun membuat mereka mengambil jalan aman untuk tidak terlibat langsung dalam penyerangan tersebut. Mereka lebih memilih memberi dukungan lisan kepada sekutu di Tim-Teng untuk "memanas-manasi" sehingga Amerika masih bisa ikut berkonfrontasi tanpa harus menggunakan kekuatan militernya, dengan ini ongkos yang dibayarkan jauh lebih murah dan rakyat dalam negeri mereka tidak akan banyak terpengaruh.

Tentunya Para Raja tersebut tidak ingin kejadian tergulingnya Raja Shah Reza di Iran oleh reformis Khomeini pada tahu 1979 terjadi pada singgasana mereka, inilah yang mereka takutkan. Seperti halnya kekuasaan pada Orde Baru selama 32 tahun itu, yang melakukan segala cara agar kekuasaannya langgeng dan orang-orang yang berada disekitar

pemerintahan yang selama itu "nyusu" tetap bisa menikmati keadaan tersebut. Walaupun rakyat yang berada dibawahnya terus-menerus berteriak akibat kurangnya perhatian pemerintah saat itu.

Kondisi seperti inilah yang sebenarnya terjadi di negara Saudi, estafet kepemimpinan dari Raja Abdullah kepada Raja Salman yang terlihat mulus diluar, sebenarnya terdapat keruwetan didalam kerajaan dan negeri mereka sendiri. Karena banyaknya orang-orang yang merasa lebih berhak untuk menempati singgasana tersebut dan ingin merasakan kekuasaan serta kenikmatan menjadi seorang raja di negeri petro-dolar.

Semangat reformasi Yaman dari sebagian besar kelompok rakyat (Baik Sunni maupun Syiah) telah berhasil menjatuhkan rezim yang berkuasa selama 33 tahun tersebut, merupakan sebuah gerakan reformis muncul dari nurani rakyat mereka sendiri yang menginginkan perubahan seperti halnya yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Di Indonesia transisi kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Presiden BJ Habibie secara keseluruhan berjalan dengan baik, tetapi yang terjadi di Yaman adalah sebaliknya transisi kekuasaan dari Presiden Saleh yang berkuasa 33 tahun kepada Presiden Mansour Hadi tidak berjalan dengan baik. Sehingga timbullah ketidak-puasan dari pihak Houthi.<sup>46</sup>

Keberhasilan rakyat Yaman inilah yang ditakutkan Saudi akan melebarkan semangat reformasi tersebut ke negeri mereka. Untuk itu agar tidak terjadi hal demikian, mereka lebih mengambil sikap agresif daripada mengedepankan dialog, mereka kemudian menyerang Yaman dengan dalih memerangi kaum kafir syi'ah dibantu oleh Amerika, Israel dan beberapa negara dalam Liga Arab yang mempunyai phobia akan kejatuhan ke-Monarki-an mereka.

---

<sup>46</sup> *Ibid*

## **2. Peran Ulama dalam Dinamika Politik Kerajaan Arab Saudi**

Negara yang saat ini memiliki identitas Islam yang sangat kuat adalah Kerajaan Arab Saudi. Sejak keruntuhan kekuasaan Islam yang berbasis di Turki tahun 1924, negara Saudi inilah yang masih tetap bertahan untuk menyematkan Islam sebagai dasar negara. Meskipun ada banyak perbedaan ketika membandingkan dinamika politik dalam kerajaan Saudi dan kekuasaan-kekuasaan Islam sebelumnya. Bahkan walaupun mengaku sebagai negara Islam ada banyak kelompok dari umat Islam yang tidak mengakui keabsahan kerajaan Saudi sebagai sebuah negara Islam, salah satunya kelompok al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden.

Ketika sebuah negara melandasi dirinya dengan Islam maka konsekuensinya secara otomatis akan mengarahkan kita untuk menelisik lebih jauh mengenai konstitusi negara tersebut dan sistem-sistem yang dibangun oleh negara itu baik itu sistem politik, ekonomi, pendidikan, hukum, dan kebijakan politik luar negeri. Bagaimana semua sistem itu dibangun dari sudut pandang Islam. Salah satu unsur yang berperan penting dalam merumuskan sistem-sistem tersebut adalah para ulama. Dalam tradisi Islam, ulama telah diakui sebagai pemilik otoritas untuk menafsirkan dan membuat ijtihad-ijtihad baru dalam sebuah masyarakat. Ibnu Taymiyyah pernah menyatakan, “dua kelompok yang memiliki otoritas untuk memimpin kebaikan masyarakat: ulama untuk memutuskan persoalan hukum dan penguasa untuk menerapkan hukum. Masyarakat harus patuh terhadap penguasa”.<sup>47</sup>

Kerajaan Arab Saudi sendiri jumlah ulamanya saat ini diperkirakan sekitar 20.000 orang.<sup>48</sup> Tahun 1971 kerajaan Saudi mendirikan sebuah lembaga untuk para ulama terkemuka sebagai wadah koordinasi antara pemerintah dan

---

<sup>47</sup> James Wynbrandt, *A Brief History of Saudi Arabia*, New York: Facts On File, Inc, 2004, hlm. 120

<sup>48</sup> Zuhur, Sherifa, *Saudi Arabia*, California: ABC-CLIO, 2011, hlm. 189

para ulama yang disebut Hay'at kibaril ulama atau dewan ulama senior yang dipimpin oleh seorang mufti besar. Tulisan ini akan menguraikan secara deskriptif dinamika peran ulama dalam politik kerajaan Arab Saudi.

Ulama adalah bentuk jamak dari Alim yang berarti seseorang yang memiliki ilmu. Dalam tradisi Islam ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu keislaman. Berdasarkan atas keilmuwan yang dimilikinya sehingga ulama dianggap sebagai penjaga atau pewaris ajaran-ajaran Islam dan penjaga Islam itu sendiri. Otoritas sebagai penafsir dan penjaga syariat Islam ini menjadikan ulama berada di posisi yang tinggi dalam masyarakat. Dalam sebuah negara yang berasaskan Islam, para ulama menduduki berbagai posisi dalam masyarakat atau negara baik secara formal maupun informal seperti, sebagai mufti, Qadhi (hakim), Khatib (penceramah), Mudarris (guru, dosen).<sup>49</sup>

Secara historis ulama memiliki otoritas yang kuat dalam masyarakat karena menjadi penafsir dan penjaga sikap dan perilaku masyarakat serta menjadi tempat masyarakat bertanya tentang hukum/legalitas dalam perbuatan mereka. Hubungannya dengan pemerintah, Ulama biasanya menjadi penasihat bagi pemerintah, pemberi fatwa, pemegang otoritas dalam pendidikan dan kehakiman. Ulama juga berperan sebagai penghubung antara rakyat dan penguasa. Sering dimintai masukan oleh pemerintah dan terkadang pula ulama berada di pihak rakyat sebagai oposisi kepada pemerintah yang dianggap zalim dan menindas masyarakat. di Mesir, pada era pendudukan Inggris dan Perancis ulama menjadi bagian penggerak utama dari kelompok oposisi yang melawan penjajah. Posisi istimewa tersebut menjadi berkurang saat negara-negara Islam bersentuhan dengan pemikiran-pemikiran

---

<sup>49</sup> Alejandra Galindo Marines, *The relationship between the ulama and the government in the contemporary Saudi Arabian Kingdom: an interdependent relationship?*, Durham theses, Durham University, 2001, hlm. 2-3



barat mengenai modernisasi. Modernisasi struktur politik dan pemerintahan, pendidikan, kehakiman perlahan-lahan menggeser peran aktif ulama dalam bidang-bidang tersebut. Peran ulama akhirnya malah menjadi rubber stamp bagi pemerintahan.<sup>50</sup>

Pengaruh modernisasi terhadap ulama diungkap juga oleh Noah Fieldman bahwa setelah berabad-abad ulama menjadi *state balance of power*, penyeimbang kekuatan eksekutif dan penjaga penerapan hukum Islam dalam kerajaan Usmani mereka akhirnya tersingkirkan dengan dibuatnya reformasi hukum pada abad 19 yang akhirnya mensubordinasi hukum syariah dan ulama tinggal menjadi alat legitimasi kekuasaan pemerintah. Fieldman menyimpulkan:

*The core claim for continuity relies on a set of related observations. First, in the traditional Sunni constitutional order, the shari'a was a transcendent, divine source of law interpreted exclusively by the scholars; but in the late Ottoman period, and in the constitutional orders that prevailed through most of the Sunni world after World War I, the shari'a became instead a set of rules defined and applied by authority of the state. In many cases, the jurisdiction of the shari'a shrank to encompass only matters of family law. Second, the scholars went from quasi-autonomous keepers of the law to, at best, dependent state functionaries. At worst, the scholars turned into purely religious figures irrelevant to adjudication or to governance more generally. Third, as a result of the first two changes, the scholars ceased to be necessary to legitimate the existing government.<sup>51</sup>*

---

<sup>50</sup> Meir Hatina, 'Ulama', *Politics and the Public Sphere An Egyptian Perspective*. Salt Lake City: The University of Utah Press, 2010, hlm. 5

<sup>51</sup> Noah Feldman, *The Fall and Rise of the Islamic State*, New Jersey: Princeton University Press, 41 William Street, 2008, hlm. 81

Dalam konteks yang lebih kontemporer Gibreel Gibreel menuliskan hubungan antara ulama dan pemerintah di Timur Tengah sebagai dua hubungan yang interdependen. Menurut Gibreel, meskipun para ulama tidak menempati posisi legislatif dalam Negara-Negara Arab namun kekuasaan mereka ada pada dua jalan utama yaitu, mempengaruhi opini publik dan memberi legitimasi atau membangkang dari pemerintah. Poin yang pertama, opini publik, bisa dijadikan oleh Ulama untuk memobilisasi umat islam untuk mendukung atau menentang kebijakan pemerintah. Sementara poin kedua, posisi penting ulama membuka akses langsung untuk berinteraksi dengan pemerintah.<sup>52</sup>

Hubungan antara ulama dan penguasa di Arab Saudi secara historis telah terjalin sejak abad ke 18 di era Muhammad ibnu Abdul Wahhab dan Muhammad ibnu Saudi. Mereka berkoalisi untuk memperluas ajaran Abdul Wahhab yang kini dikenal dengan ajaran Wahhabi dan memperluas kekuasaan ibnu Saudi di Jazirah Arab saat itu. Sejak saat itu, agenda-agenda politik Ibnu Saud mendapatkan dukungan religius melalui fatwa-fatwa Abdul Wahhab. Simbiosis mutualisme antara kedua entitas, pemerintah dan ulama masih tetap berjalan meskipun dalam sejarahnya terjadi pasang surut dalam politik kerajaan Saudi. Seperti pada peristiwa perang antara kekuasaan Saudi dan kekhalifahan Usmani pada tahun 1790an yang memenangkan Turki Usmani dan menghapuskan kekuasaan kerajaan Ibnu Saud.<sup>53</sup> Kemudian kekuasaan Saudi bangkit lagi tahun 1824 setelah penerus kerajaan Saudi, Muhammad Ali merebut kembali kekuasaan di Riyadh yang telah diambil oleh kekuasaan Usmani dan kemudian mengkonsolidasi kekuasaan dan mengembalikan martabat

---

<sup>52</sup> Gibreel Gibreel. "The Ulema: Middle Eastern Power Brokers", Middle East quarterly, Volume VIII: Number 4, 2001, <http://www.meforum.org/105/the-ulema-middle-eastern-power-brokers>, diakses 28/11/17 pukul 19:00

<sup>53</sup> David Commins, *The Wahhabi Mission and Saudi Arabia*. London: I.B.Tauris & Co Ltd, 2006, hlm. 42

mazhab wahhabi dan para ulamanya.<sup>54</sup> Namun, runtuh kembali pada tahun 1837 setelah diserang oleh Mesir. Dan akhirnya bangkit kembali tahun 1843. Posisi ulama masih tetap menjadi pendukung setia dari Kerajaan Saudi. Dukungan tersebut tetap langgeng hingga berdirinya kerajaan Arab Saudi secara resmi tahun 1932.

Setelah terbentuknya kerajaan Arab Saudi proses modernisasi struktur pemerintahan dan birokratisasi ulama terjadi menjadi hal yang tak terelakkan bagi pemerintah Saudi di masa Raja Faizal tahun 1950an. Modernisasi secara massif terjadi utamanya setelah Raja Saudi mengeluarkan 10 program reformasi dalam kekuasaan dinasti Saudi termasuk merumuskan konstitusi baru, membentuk badan konsultasi dan pemerintahan lokal. Setelah itu dibentuk berbagai kementerian, biro-biro dan agensia-agensi yang bertanggung jawab dalam hal perminyakan, urusan-urusan wilayah, pekerjaan dan perencanaan publik. Disamping itu, ulama juga dibirokratisasi melalui pembentukan agensi-agensi pemerintah yang berkaitan dengan penelitian agama, pendidikan perempuan, urusan masjid dan yayasan keagamaan. Reformasi ini, modernisasi dan birokratisasi menurut Yassini, berdampak pada berkurangnya peran ulama atau agama dalam ruang publik serta birokratisasi ulama menjadikan ulama berada di dalam kontrol kuasa kerajaan Arab Saudi.<sup>55</sup> Sejak reformasi tersebut peran ulama yang berada di kontrol kekuasaan membenarkan tesis dari Gibreel mengenai peran ulama di Saudi sebagai pemberi legitimasi atas kebijakan-kebijakan pemerintah.

Tahun 1971 pemerintahan Saudi membentuk Dewan Ulama Senior berfungsi sebagai lembaga konsultatif antara pemerintah dengan ulama. Lembaga ini dipimpin oleh seorang mufti besar yang telah ditunjuk oleh pemerintah Saudi. Kedua lembaga ini melakukan pertemuan rutin setiap minggu. Dalam isu-isu tertentu pemerintah biasanya meminta persetujuan atau

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 45

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 106

sanksi publik dari para ulama senior tersebut. Dalam perjalanannya, lembaga ini menjadi sarana konsolidasi publik kerajaan untuk mendukung aktifitas pemerintah. Menurut Madawi Rasheed, para ulama di Saudi, khususnya ulama senior, memiliki tiga mekanisme dalam mendukung konsolidasi politik pemerintah yaitu, Hijrah, Takfir dan Jihad. Konsep hijrah ini digunakan untuk membuat garis pemisah antara negara Islam Saudi dan negara lain. Pada abad 18 wilayah Saudi lah yang dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk berhijrah dibandingkan provinsi-provinsi lain dibawah kekuasaan Usmani yang sudah sesat.<sup>56</sup>

Metode kedua untuk mengokohkan kedudukan stabilitas politik di Saudi adalah dengan melalui takfir atau penyesatan kepada orang-orang muslim yang berbeda dengan pendapat resmi yang dikeluarkan oleh para ulama Saudi baik dalam perkara aqidah dan ibadah ataupun sosial dan politik. Orang-orang atau kelompok yang telah disematkan label kafir atasnya maka, pemerintah wajib untuk mengajak orang tersebut bertaubat jika tidak maka, wajib atasnya untuk dibunuh atau diperangi. Sikap ini telah diperlihatkan oleh Muhammad ibnu Abdul Wahhab ketika mengkafirkan masyarakat Muslim dibawah kekuasaan Usmani yang kemudian menjadi justifikasi bagi kelompok Abdul Wahhab dan Ibnu Saud untuk memerangi mereka. Kemudian cara ketiga koalisi Saudi-Wahhabi untuk mengokohkan posisi politiknya adalah melalui Jihad atau memerangi orang-orangkafir. Praktek ini sering didengung-dengungkan oleh ulama Saudi utamanya pada masa-masa pembentukan dan ekspansi kekuasaan Saudi.<sup>57</sup>

Ketiga poin tersebut menurut Rasheed, meski mengatasnamakan terminology Islam namun kosong dari makna Islam karena telah berubah menjadi senjata politik

---

<sup>56</sup> Madawi Rasheed, *Contesting the Saudi State: Islamic Voices from a New Generation*, New York: Cambridge University Press, 2007, hlm. 34-37

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 37-42

(political weapon) untuk mengkonsolidasikan kerajaan dan ulama sebagai penjaga moralnya.

Sebenarnya tidak semua ulama di Saudi menjadi pendukung setia pemerintahan Saudi. Ulama yang dimaksud hanyalah yang tergabung dalam Dewan Ulama Senior dan Mufti. Ada banyak ulama independent, dikampus, atau imam yang memiliki pandangan berbeda dengan ulama Senior dan bahkan sering mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintahan. Namun, mereka yang mengkritik diintimidasi, ditangkap atau dipenjarakan begitupun juga nasib kelompok-kelompok oposisi yang lain.

Terdapat beberapa kasus yang memperlihatkan pentingnya peran ulama senior di Arab Saudi dalam mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Diantaranya, kasus pendudukan masjidil haram oleh kelompok salafi tahun 1979. Peristiwa perang teluk 1990 dan munculnya kritik dari para tokoh dan ulama di internal Arab Saudi di era perang teluk atau pasca perang teluk.

#### **a. Pengepungan Masjidil Haram 1979**

Tahun 1979 kelompok oposisi yang mengatasnamakan diri sebagai al-Jama`a al-Salafiyyah al-Muhtasib dipimpin oleh Juhayman al-Utaybi bersama Muhammad ibn Abdullah al-Qahtani mengepung masjidil haram di Makkah selama tiga minggu dan menyandera sekitar 130 orang yang sedang beribadah. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap kebijakan modernisasi pemerintah Saudi seperti pengadopsian teknologi baru di Saudi. Pada pernyataan sikap yang disampaikan pada saat penyanderaan masjid, kelompok ini menyerukan untuk menghapus pengaruh budaya barat dan memutus hubungan kepada negara-negara barat yang telah mengeksploitasi negara Saudi.

Para ulama juga dianggap gagal untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah yang menentang Islam oleh karenanya menurut mereka, kerajaan Monarki Saudi harus dijatuhkan dan diganti dengan pemerintahan Islam yang benar

dan lurus.<sup>58</sup> Ulama juga dianggap telah dibeli oleh Penguasa Saudi untuk mendukung kerajaan. Syekh Abdul Aziz bin Baz, mufti besar Saudi, dianggap sebagai alat manipulasi keluarga kerajaan yang korup. Sebagai pemimpin gerakan Salafiyah, Juhayman menolak pendapat para ulama Wahhabi yang mengharamkan menjatuhkan pemerintah yang sah selama belum kufur dan melarang pelaksanaan ajaran Islam. Juhayman menganggap tidak ada negeri Islam yang betul-betul menjalankan pemerintahan Islam sebenarnya karena telah mengadopsi sistem-sistem pemerintahan asing. Kelompok ini akhirnya bisa ditumpas setelah Saudi mendapatkan bantuan dari 100.000 tentara Pakistan dan bantuan intelijen dari pemerintah Perancis, Amerika dan Jerman. Juhayman dieksekusi mati dan al-Qahtani meninggal dalam peperangan. Yang penting dalam peristiwa ini adalah, tindakan keras pemerintah terhadap para “pemberontak” baru diambil setelah raja Khalid meminta fatwa dari dewan ulama senior dan fatwa tersebut keluar dan mendukung untuk bertindak tegas pada kelompok salafi tersebut. Dalam fatwa yang diputuskan tahun 1979 tertulis:

*“On Tuesday, His Majesty King Khalid ibn 'Abd al-'Aziz al-Sa'ud called us, the undersigned, and we met in his majesty's office in al-Ma'dhar. He informed us that at dawn that day. We told him that it is incumbent to call on them to surrender and lay down their arms. If they did, their surrender would be accepted and they would be imprisoned until their case was considered according to the Sharia. If they refused, all measures would be taken to seize them and to kill those who were not arrested or had not surrendered”.*<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Joseph A Kechichian, “The Role of the Ulama in the Politics of an Islamic State: The Case of Saudi Arabia”, *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 18, No. 1, 1986, hlm. 59

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 66-67

## **b. Perang Teluk 1990**

Pada saat terjadinya Invasi Irak terhadap Kuwait, Raja Fahd merasa khawatir bahwa ekspansi Irak akan berlanjut ke Saudi setelah Kuwait ditaklukkan. Raja Fahd juga khawatir untuk meminta bantuan dari Amerika Serikat karena akan menjatuhkan citranya sebagai Khadimul Haramain (penjaga dua kota suci) jika memanggil tentara kafir untuk datang ke Arab Saudi. Bahkan saat pertama kali Amerika Serikat menawarkan bantuan keamanan ke Arab Saudi para ulama dan masyarakat domestik menolak rencana tersebut. Setelah diskusi yang panjang akhirnya mufti besar yang saat itu dipegang oleh Abdul Aziz bin Baz dan para ulama dalam dewan senior ulama bersepakat untuk mendukung kebijakan pemerintah dengan syarat-syarat yang ketat bagi pasukan asing tersebut seperti, harus menghormati tradisi kerajaan, harus segera meninggalkan Arab Saudi jika tidak dibutuhkan lagi dan harus tunduk pada polisi agama atau Komite amar ma'ruf nahi munkar. Berikut kutipan singkat fatwa dewan ulama senior:

“Dengan segala kemungkinan, Dewan ulama senior mendukung tindakan yang diambil oleh pemerintah, semoga Allah menganugerahinya kesuksesan; mempersiapkan kekuatan yang dilengkapi dengan perlengkapan yang bisa menggentarkan dan menimbulkan rasa takut bagi siapa saja yang ingin menyerang negeri Ini. kewajiban ini dituntut oleh kondisi tertentu dan menjadi tak terelakkan karena situasi yang sangat menyakitkan tersebut. Dasar hukum dan fakta menuntut bahwa yang memegang urusan kaum muslimin harus mencari bantuan kepada yang lain yang mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini telah diperintahkan dalam Quran dan Sunnah agar bersiap siaga sebelum terlambat”.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Charles Kurzman. Pro-U.S. Fatwas. Global Middle East Policy, Vol. X, No. 3, Fall 2003, hlm. 157

Fatwa ini menjadi pendukung kebijakan pemerintah Saudi untuk memberikan kebebasan kepada militer Amerika Serikat untuk membuat pangkalan militer di wilayah kerajaan. Kebijakan pemerintah Saudi yang didukung oleh fatwa ulama menimbulkan kemarahan di kalangan kelompok mujahidin al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Kemarahan ini menjadi sebab dari deklarasi Kecaman dan Tokoh-tokoh Islam perang al-Qaeda terhadap Amerika dan kerajaan Saudi tahun 1996 untuk mengusir Pendudukan Amerika di dua kota suci.<sup>61</sup> Kritik juga muncul dari banyak tokoh-tokoh ulama yang menganggap Arab Saudi telah menguasai rumah Islam. Para tokoh tersebut mengingatkan dengan mengirim surat ke Dewan Ulama Senior dan Institusi fatwa dan penelitian bahwa musuh yang lebih besar bukan Saddam tapi Amerika dan negara barat.

## **B. Kondisi Ekonomi dan Militer**

Pada tahun 1951, di bawah suatu persetujuan timbal balik, Amerika Serikat membentuk misi pelatihan militer di Arab Saudi dan bersedia menyediakan pelatihan untuk mendukung penggunaan senjata dan jasa terkait dengan keamanan Saudi. Amerika mengirimkan tenaga ahli di bidang militer ke Arab Saudi untuk membangun instalasi militer di Saudi. Persetujuan ini menjadi dasar hubungan keamanan Amerika Serikat dengan Arab Saudi. Tetapi hal yang paling penting dalam melandasi hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat, adalah akses minyak Arab Saudi dan sikap Amerika Serikat untuk melindungi Monarki Arab Saudi ini dari ancaman pihak luar. Hal ini dibuktikan ketika pada tahun 1960 terjadi konfrontasi antara Mesir dan Arab Saudi dan pada tahun 1991 saat terjadinya Perang Teluk II, Amerika Serikat menjadi pelindung Arab Saudi. Dalam proses kerjasama militer selanjutnya, antara Arab Saudi dengan Amerika Serikat, terjadi pembaharuan komitmen yang disebut

---

<sup>61</sup> David Commins, *Op.cit.*, hlm. 187-188



sebagai Persetujuan Al Khobar (*Al-Khobar Agreement*) pada Juni 1996.

Persetujuan Al Khobar bertujuan untuk meningkatkan pertahanan kolektif sekaligus untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Pada 2001, Amerika Serikat mendeklarasikan *Global War on Terrorism*. Arab Saudi bergabung bersama Amerika Serikat dan menjadi pendukung utama di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat dan Arab Saudi melakukan pengawasan dan penumpasan terorisme secara bersama-sama. Aliansi dalam memerangi terorisme ini membantu Arab Saudi dalam mengatasi kelompok-kelompok bersenjata yang melakukan serangkaian aksi teror di Arab Saudi. Hal ini terbukti berhasil ketika pasukan Arab Saudi menewaskan pemimpin kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Al-Qaeda dan menangkap anggota-anggotanya.

Dari ketiga upaya yang dilakukan Monarki Arab Saudi, peranan Amerika Serikat dalam menjaga eksistensi Monarki Arab Saudi merupakan upaya yang paling efektif. Faktanya adalah ketika Arab Saudi menghadapi serangkaian serangan dari kelompok-kelompok bersenjata atau ancaman dari negara-negara luar seperti Iran atau Irak pada Perang Teluk II, Amerika Serikat menjadi pelindung utama Arab Saudi. Akan tetapi, upaya yang lain dari Monarki Arab Saudi juga mendukung peranan Amerika Serikat di Arab Saudi. Amerika Serikat menjadi pelindung Arab Saudi disebabkan oleh kepentingan Amerika Serikat terhadap minyak yang dimiliki Arab Saudi. Amerika Serikat akan selalu menjadi sahabat bagi Arab Saudi jika pasokan minyak Arab Saudi masih dapat memenuhi kebutuhan Amerika Serikat. Selain hal tersebut, keberadaan pasukan Amerika Serikat juga dipengaruhi oleh fatwa ulama Wahhabi yang memperbolehkan Amerika Serikat memainkan peranan baik di bidang ekonomi maupun militer di Arab Saudi. Namun hal ini dapat berubah tergantung situasi dalam negeri, regional Arab, dan internasional.

### **C. Konteks Internasional**

Rivalitas antara Arab Saudi dan Iran tak muncul begitu saja dalam ruang hampa, melainkan terbentuk oleh sejarah panjang sejak keduanya menjadi negara modern. Pernah menjalin hubungan yang cukup harmonis, sejak revolusi Iran pada 1979, praktis hubungan keduanya cenderung diwarnai oleh berbagai konflik dan ketegangan. Sebagai dua negara yang memegang peranan kunci di Timur Tengah, keduanya saling berebut pengaruh untuk menjadi negara hegemon yang mengendalikan negara-negara kecil di kawasan.

Meski nyaris tak pernah terlibat dalam pertempuran militer secara langsung, tapi keduanya banyak bertrok kepentingan di berbagai negara yang tengah berkonflik. Untuk memahami kondisi mutakhir rivalitas dua negara berpengaruh ini, penting untuk melacak kembali riwayat hubungan keduanya. Catatan riwayat hubungan keduanya penting untuk memberikan gambaran secara utuh sehingga bisa didapatkan konteks yang tepat. Sebelum membahas lebih jauh tentang dinamika hubungan Arab Saudi dan Iran, penting untuk terlebih dulu disajikan gambaran tentang profil kedua negara.

#### **1. Dinamika Hubungan Arab Saudi-Iran Sebelum Arab Spring**

Arab Saudi mempunyai hubungan bilateral yang cukup rumit dengan Iran. Meskipun dua negara ini merupakan negara Islam, namun hubungan keduanya banyak dibangun dari ketegangan dan konflik. Pemerintah Riyadh berbenturan kepentingan dengan Teheran dalam banyak isu mulai geopolitik, politik minyak, sikap terhadap Amerika Serikat dan Barat, serta ambisi atas tongkat kepemimpinan Islam.

Sebagaimana dibahas sebelumnya, Arab Saudi merupakan negara monarki absolut yang menganut Sunni sebagai aliran resmi negara. Sedangkan Iran merupakan negara mayoritas Syiah dengan bentuk Republik Presidensial Islam yang menjadikan isu revolusi Islam sebagai salah satu kampanye utamanya. Saudi membangun hubungan dekat dengan Amerika Serikat dan Barat sedangkan Iran pasca

revolusi konsisten membangun isu anti-barat. Iran bahkan menuding Arab Saudi sebagai antek barat yang menjadi penjaga kepentingan barat di kawasan.

Perbedaan aspirasi dan sikap tersebut menempatkan keduanya dalam rivalitas yang cukup sengit. Berbagai perbedaan mendasar antara Saudi dan Iran ini melahirkan ketegangan yang terjadi mulai dari perang kata-kata antara elit pimpinan kedua negara, sampai perang proksi di negara-negara dimana terdapat perbedaan kepentingan keduanya. Gambaran ketegangan keduanya tampak jelas dalam pernyataan keras Raja Abdullah yang mengatakan bahwa di dunia ini ada dua negara yang tak layak eksis, yaitu Iran dan Israel. Pernyataan tersebut dikatakan Raja Abdullah kepada Harve Morin, Mantan Menteri Pertahanan Perancis. Mantan pemimpin tertinggi kerajaan Saudi tersebut juga di sebut sempat mendesak Amerika Serikat untuk menyerang Iran dan menghentikan program senjata nuklirnya. Dengan nada sarkastis, Abdullah menyebut Iran merupakan kepala ular yang mesti dipotong.<sup>62</sup>

Dari pihak Iran, Ayatollah Khomeini, Bapak Revolusi negara tersebut pernah mengatakan dengan nada yang tak kalah keras bahwa Saudi merupakan pengkhianat kaum muslim, berikut pernyataan lengkap Khomeini yang memicu pemutusan hubungan diplomatik kedua negara antara tahun 1987 sampai 1991:

*"...these vile and ungodly Wahhabis, are like daggers which have always pierced the heart of the "Muslims" from the back," and announced that Mecca was in the hands of "a band of heretics."*<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> "Iran's Ahmadinejad dismisses Wikileaks cables release". BBC News. 29 November 2010. <http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-11860435>, diakses 8/03/18 pukul 20:10

<sup>63</sup> Khomeinis messengers in mecca Martin Kramer. <http://martinkramer.org/sandbox/reader/archives/khomeinis-messengers-in-mecca>, diakses 8/03/18 pukul 19:45

Ketika masih menjadi Presiden, Ahmadinejad juga pernah melontarkan sindiran keras yang ditujukan kepada Arab Saudi. Ahmadinejad mengatakan bahwa negara-negara barat melancarkan invasi ke Afghanistan dan Irak sebagai balasan atas peristiwa 11 September, padahal basis utama Al Qaeda ada di negara lain yang masih leluasa menikmati keuntungan luar biasa dari minyak dan mempunyai hubungan sangat erat dengan Amerika Serikat dan Negara Barat lain. Lebih lanjut, Ahmadinejad menegaskan bahwa negara tersebut sama sekali tak pernah melaksanakan pemilihan demokratis, melarang perempuan berkendara, tapi Amerika Serikat dan negara barat lain malah mendukung negara yang tak demokratis tersebut.<sup>64</sup>

Hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran dibangun pertama kali pada tahun 1928. Pada tahun 1966, pemimpin Saudi saat itu, Raja Faisal, melakukan kunjungan kenegaraan ke Iran untuk memperkuat hubungan antara kedua negara. Kunjungan tersebut segera dibalas oleh Shah Iran yang sekaligus melahirkan resolusi damai atas kasus perselisihan pulau Farsi dan Arabi. Kesepakatan tersebut menyerahkan pulau Farsi pada kedaulatan Iran dan memberikan kedaulatan penuh pada Arab Saudi atas Pulau Arabi.<sup>65</sup> Ketika Inggris menyatakan penarikan mundur pasukanya dari Teluk Persia pada tahun 1968, Saudi dan Iran mengambil langkah bersama untuk menjaga keamanan dan perdamaian di kawasan tersebut. Rentang waktu 1968 sampai 1979 merupakan masa terindah dalam riwayat hubungan kedua negara dimana Riyadh cenderung mempunyai hubungan yang harmonis dengan Teheran.

---

<sup>64</sup> Press TV Iran-Saudi Arabia come to blows over Yemen, 15 January 2010.

<http://www.presstv.com/detail.aspx?id=116192&sectionid=351020101>, diakses 8/03/18 pukul 14:30

<sup>65</sup> Kaven L. Afrasiab, "Saudi-Iran Tension Fuel Wider Conflict" Asia Times, 6 December 2006.

[http://www.atimes.com/atime/Middle\\_East/HLO6AKo4.html](http://www.atimes.com/atime/Middle_East/HLO6AKo4.html), diakses 9/03/17 pukul 19:15

Memasuki era 70an hubungan Saudi dan Iran mulai menghangat. Kebijakan modernisasi militer Iran yang semakin menambah kekuatan negara tersebut menghadirkan kekhawatiran di pihak Saudi. Dengan kekuatan militer barunya, Iran mempunyai potensi untuk mendominasi kawasan, hal tersebut tentu menjadi kabar buruk bagi Saudi. Setelah Iran memasuki masa Revolusi Islam yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini, praktis hubungan Arab Saudi dan Iran banyak diwarnai dengan ketegangan dan konflik. Pasca revolusi, Iran mengalami banyak perubahan fundamental, perubahan yang turut berimbas pada pendekatan kebijakan luar negeri.

Perubahan ini memicu kekhawatiran pihak Saudi. Setidaknya ada dua hal yang memicu kekhawatiran Saudi. Pertama, ambisi Ayatollah Khomeini untuk menyebarluaskan semangat revolusi islamnya ke negara-negara kawasan; Yang kedua, sikap Iran yang secara frontal anti-Amerika Serikat dan Barat. Dua hal yang ini memicu kemarahan pihak Riyadh lantaran Saudi merupakan negara monarki absolut yang jelas menjadi salah satu sasaran kampanye ekspor revolusi Iran, dan Amerika merupakan salah satu sekutu terdekat sekaligus pelindung kepentingan Arab Saudi, terutama terkait isu-isu seputar kawasan.

Saat terjadi perang Iran-Iraq pada tahun 1980an, Arab Saudi menjadi penyokong utama pihak Iraq. Pemerintah Saudi mengucurkan tak kurang dari 25 juta USD untuk membantu pemerintah Saddam Husein menghadapi Iran. Sejatinya Arab Saudi mempunyai hubungan yang kurang baik dengan Partai Baath yang saat itu merupakan partai penguasa di Iraq, Saudi memilih untuk mengabaikan hal tersebut namun demi membendung Iran. Saudi bahkan mendorong negara-negara teluk lainnya, termasuk Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Uni Emirat Arab, untuk ikut membantu mengucurkan dana bagi Iraq juga. Periode ini menjadi babak baru hubungan Arab Saudi Iran dimana Saudi melihat Iran sebagai ancaman serius terhadap kepentingan nasional dan stabilitas di kawasan.

## **2. Dinamika Hubungan Arab Saudi-Iran Pasca Arab Spring**

Musim Semi Arab telah membawa banyak perubahan di Timur Tengah. Kejatuhan rezim di beberapa negara yang dilanda Arab Spring menghadirkan peta politik baru yang mengundang perhatian khusus dari Arab Saudi dan Iran. Sebagai dua negara berpengaruh di kawasan tersebut, Saudi dan Iran ikut terusik dengan pergolakan yang terjadi selama Arab Spring. Perubahan konfigurasi politik di negara-negara yang dilanda Arab Spring turut berimbas pada kepentingan dua negara tersebut dalam mengejar prioritas kebijakan luar negeri mereka di kawasan. Sebagaimana disampaikan di bab sebelumnya, Arab Saudi dan Iran senantiasa bersaing memperebutkan pengaruhnya di kawasan. Perubahan besar yang dilahirkan gelombang Arab Spring ini membenghadirkan celah baru bagi kedua negara berpengaruh ini untuk memperbesar pengaruh mereka.

Atas dinamika politik baru yang berkembang dikawasan ini, Saudi dan Iran tak tinggal diam. Mereka banyak melakukan “investasi” di negara-negara yang tengah bergejolak. Ada pola yang menarik ketika kita mengkaji rivalitas keduanya di kawasan pasca musim semi Arab ini, yaitu Arab Saudi cenderung berada di pihak yang mempertahankan status quo, sedangkan Iran mendukung kelompok penantang. Arab Saudi melihat kejatuhan rezim penguasa di Mesir, Tunisia, dan Yaman dengan kekhawatiran, sementara pemimpin Iran melihat peristiwa tersebut dengan antusias, mereka menyambut baik perubahan rezim ini sebagai peluang untuk penyebaran pesan revolusioner Islam yang tengah menemukan momentumnya untuk mereka. Iran melihat pergolakan politik yang terjadi ini sebagai kekalahan bagi AS dan kebangkitan gerakan Islam yang membebaskan di Timur Tengah.

Konsolidasi demokrasi pasca Arab Spring tak selalu berjalan mulus, di beberapa negara bahkan justru terjadi pergolakan yang tak kunjung usai. Ketidakpuasan akan rezim baru ataupun proses transisi yang berlangsung melahirkan

pemberontakan yang menyebar luas. Di Suriah dan Yaman, bahkan muncul pemberontakan bersenjata yang berujung pada perang sipil yang berkepanjangan, pemberontakan menyebar di hampir seluruh wilayah. Arab Saudi dan Iran yang terlibat dalam rivalitas untuk memperebutkan pengaruh di kawasan turut mengambil kesempatan dari konflik yang terjadi di negara-negara yang lemah tersebut sebagai sarana untuk menumbuhkan pengaruh politik mereka. Arab Saudi dan Iran tidak hanya terlibat dalam perang proksi satu sama lain, kini mereka bahkan melakukan intervensi militer langsung, salah satunya di Yaman.

Di Suriah, rezim Bashar al-Assad berdiri kokoh dengan sokongan Iran. Majalah *the Economist* edisi Januari 2015 menyatakan, Iran tak hanya membantu dengan bahan bakar dan senjata, tetapi juga ratusan penasihat dari Pasukan Garda Revolusi Iran serta ribuan milisi Syiah yang dilatih Iran di Lebanon dan Irak. Sebaliknya, Saudi dan negara-negara Arab lainnya terus mendukung perjuangan kelompok oposisi yang ingin menumbangkan rezim al-Assad sejak dimulainya Arab Spring.

Di Irak, Menteri Pertahanan Khalid al-Obaidi menyatakan, Iran berperan penting melawan ISIS di Irak. Pemerintah Irak yang sebelumnya kewalahan melawan ISIS, dengan bantuan milisi Syiah yang dilatih Iran, akhirnya bisa merebut kembali beberapa kota seperti Amerli, Baiji, dan Erbil di wilayah Kurdi. Saudi juga memulihkan hubungan dengan Irak untuk mengimbangi pengaruh Iran. Saudi merencanakan membuka kembali kedutaannya di Baghdad dan konsulat di Erbil, setelah 25 tahun putusannya hubungan diplomatik keduanya.

Di Yaman, Saudi memimpin Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) untuk mendukung kepemimpinan Presiden Mansour Hadi yang terus dirongrong milisi al-Houthi yang didukung Iran. Ketika Presiden Mansour Hadi melarikan diri dari pengepungan al-Houthi di Sanaa dan menjalankan roda pemerintahan di Kota Aden, Yaman selatan, negara-negara GCC pun memindahkan kedutaannya dari Sanaa ke Aden.

Demi terus mempertahankan Pemerintah Hadi, Saudi pun memimpin koalisi untuk serangan udara terhadap milisi Houthi yang juga mulai menguasai Aden dan berusaha merebut Yaman secara keseluruhan. Setelah pendudukan Sanaa, al-Houthi dan Iran justru meneken perjanjian pembukaan penerbangan langsung kedua negara.